

SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Makalah dipresentasikan pada Pelatihan Clinical Instruktur Politeknik Kesehatan
Depkes Yogyakarta. Yogyakarta, 22-25 September 2008.

Oleh: Prof. Soenarto, MSc, MA, PhD
Dosen FT-UNY
Direktor Program Pascasarjana UNY

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, diundangkan tanggal 8 Juli 2003, dalam pasal 1 (1) menyatakan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

Sedangkan dalam pasal 3 dinyatakan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan pasal 15 (UUSPN tahun 2003) dinyatakan: "Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu". Pasal 16 menyatakan "Politeknik adalah jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidikan profesional sebagai *higher education* atau keahliannya untuk melakukan pekerjaan pada tingkat supervisor sebagai sarana perubahan, berfungi untuk mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan sekolah (SD, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK, dan perguruan tinggi) atau pendidikan luar sekolah, tinggi, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kesiapan sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, kepribadian, keterampilan, menjadi kerja sangat bervariasi dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Ditinjau dari jalur dan tujuan, pendidikan dibedakan menjadi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan non formal. Pendidikan umum

B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN

(*general education*) bertujuan mendidik dan mempersiapkan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, orientasi mata pelajaran Disini peran pendidikan, disamping menghantarkan anak bangsa bersifat umum, cakupannya luas, mengarah pada peningkatan daya penalaran meningkatkan daya penalaran, wawasan, kemampuan, dan demokrasi, dan berfikir logis. Sedangkan pendidikan kejuruan (*vocational education*), pendidikan harus berperan aktif membantu mengatasi pengangguran tersebut. bertujuan mendidik dan mempersiapkan siswa untuk dapat bekerja. Perlu difikirkan bahwa pendidikan (a) dapat mengubah manusia sebagai beban mendapatkan uang sebagai bekal hidup, orientasi mata pelajaran bersifat masyarakat menjadi manusia yang produktif, (b) bekal apa yang harus spesifik pada bidang tertentu, cakupannya sempit, mengarah pada pengetahuan diberikan kepada peserta didik agar bagi yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya memiliki bekal terjun ke dunia kerja/masyarakat; (c) memiliki motivasi dan kiat-kiat untuk menghidupi dirinya

Kecakapan generik bersifat umum, diperlukan dalam kehidupan sehari-hari baik bekerja, tidak bekerja, atau sedang menempuh pendidikan. Yang dibedakan menjadi 2 jenis:

- Kecakapan personal (personal life skill), mencakup mengenal diri (self awareness) dan kecakapan berfikir (thinking skill). Merupakan penghayatan terhadap dirinya, terhadap Tuhan, dan lingkungan (sekarang dan masa depan). Mensyukuri apa yang ada pada dirinya, memahami kedudukannya, berfikir secara rasional, menemukan dan mengembangkan kreativitas untuk masa depannya.
- Kecakapan sosial (social skill). Kecakapan antara personal mencakup kecakapan komunikasi dengan empathy (memahami) dan kecakapan bekerja sama (collaboration skill). Empathy adalah sikap penuh pengertian dengan menerapkan seni berkomunikasi dua arah, yang menumbuhkan hubungan harmonis.

Diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dimaksudkan agar terjadi pemerataan kekuasaan dan sumber daya (*distribution of power and resources*) antara pusat dan daerah secara seimbang. Namun kenyataan masih terjadi tarik ulur antara pusat dan daerah, belum adanya kejelasan dan kesamaan pemahaman tentang kewenangan masing-masing, sementara daerah belum memiliki kesiapan dalam merespon perubahan tuntutan *stake holder* yang bervariasi dan berlangsung cepat.

(3) Masih rancunya peranan Eksekutif dan Legislatif dan Yudikatif. Hal ini disebabkan banyaknya informasi baru yang diserap, *input* dapat diproses dan diterapkan secara efektif dan efisien, karena sudah lama terbiasa dengan kebijakan *top-down*.

(4) meningkatkan keterampilan manajerial sehingga pengalokasian dana dan sumber daya dilakukan secara efisien, Untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, pemerintah daerah mempunyai peranan dalam 4 hal:

- (a) menentukan jenis, jenjang, jumlah, dan lokasi sekolah dengan mempertimbangkan keberadaan calon peserta didik, tersedianya jaringan dunia usaha dan industri organisasi, menanganai risiko, dan melakukan perencanaan strategi.
- (b) mendorong *enterpreneur* untuk mempromosikan individu, kemampuan mengelola tempat sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pendidikan maupun sebagai tempat penyaluran lulusan;

Penelitian di negara-negara ASEAN; Richardson (1999) menyatakan bahwa pada negara-negara berkembang, pendidikan dasar dan menengah memberikan sumbangan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada negara maju sumbangan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia secara mandiri dan demokrasi, pengambilan keputusan secara partisipatif, dan akuntabilitas publik secara transparan dan

Dilihat dari data struktur tenaga kerja sebagian besar angkatan kerja Indonesia (53%) tidak berpendidikan, 34% berpendidikan dasar, 14% berpendidikan menengah, dan hanya 2% berpendidikan tinggi (Boediono, 1997:2) meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Kecerdasan intelektual atau *intellectual intelligence* telah lama dipakai sebagai tolok ukur kemampuan dasar manusia untuk mengpreksa keberhasilan di masa mendatang, dengan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 6 aspek:

- (1) meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam pengetahuan & keterampilan;
 - (2) meningkatkan mobilitas dan promosi tenaga kerja;
- perpaduan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional.

Pendidikan Kejuruan Bertaraf Global

Terbukanya pasar bebas *Asean Free Trade Agreement* (AFTA) dan *Asean Free Labour Agreement* (AFLA) yang secara resmi dimulai tahun 2003, dan *Asia Pasific Economic Center* (APEC) yang akan berlaku tahun 2020, berarti barang produksi dan tenaga kerja asing dapat masuk ke Indonesia secara legal. Sementara daya saing produk-produk dalam negeri sangat lemah, kualitas tenaga kerja dan kualitas layanan di Indonesia sangat rendah dibanding dengan tenaga kerja dari negara ASEAN dan Asia Pasific lainnya. Oleh sebab itu jika pendidikan kejuruan tidak menyiapkan peserta didik dengan sebaik-baiknya, lulusan pendidikan kejuruan akan menjadi asing di negara sendiri sementara tenaga kerja asing bekerja mendapatkan uang dari negara Indonesia yang sekarang dalam kategori negara miskin.

UUSPN Tahun 2003 pasal 50 ayat (3) berbunyi "pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional". Secara formal ayat tersebut mengisyaratkan perlunya upaya *re-engineering* atau penataan kembali konsep, perencanaan dan implementasi pendidikan kejuruan dalam mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas menghadapi pasar bebas tahun 2020 (Djojonegoro, 1997; Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2001). Pada tataran makro, *re-engineering* mengarah pada penataan sistem dan penentuan jenis pendidikan dan pelatihan kejuruan sehingga lulusannya mendapatkan sertifikat berstandar Internasional dan atau Nasional pada satu atau lebih keahlian. Sedangkan secara mikro penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan dilaksanakan melalui pendekatan "*Competency Based Training*".

Pelatihan pra-jabatan atau *pre-training*, dimaksudkan sebagai *job orientation* atau pengenalan terhadap pekerjaan bagi tenaga kependidikan yang baru. Pelatihan dalam jabatan atau *on the job training*, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bagi pegawai lama karena pengembangan lembaga, penerapan teknologi baru, kurikulum baru, atau aturan baru. Pelatihan semacam ini dapat dilakukan di lembaganya sendiri atau di luar lembaga seperti praktik antara pusat dan daerah, belum adanya kejelasan dan kesamaan pemahaman tentang program penyegaran atau *refreshing program*.

Masih rancunya peranan Eksekutif dan Legislatif dan Yudikatif. Hal ini disebabkan Dalam menghadapi pasar global AFTA dan AFLA di kawasan ASEAN dan APEC di Asia Pasific, upaya restrukturisasi dan revitalisasi pendidikan dan pelatihan kejuruan perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit. Perencanaan pendidikan harus didasarkan analisis futuristik melalui analisis kebutuhan, analisis SWOT, dan studi penelusuran tujuan. Untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, pemerintah daerah mempunyai peranan dalam 4 hal: Keterlibatan aktif pihak dunia kerja sebagai pemakai lulusan sekolah kejuruan dan peranan *stakeholder* dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dikelola dengan baik melalui penerapan MPMB.

1. Peranan Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Life Skill:
 - (a) melibatkan secara langsung warga sekolah (komite sekolah, komite pendidikan, majelis pendidikan) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional;
 - (b) melibatkan secara langsung warga sekolah (komite sekolah, komite pendidikan, majelis pendidikan) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional;
 - (c) melibatkan secara langsung warga sekolah (komite sekolah, komite pendidikan, majelis pendidikan) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional;
 - (d) melibatkan secara langsung warga sekolah (komite sekolah, komite pendidikan, majelis pendidikan) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional;
 - (e) melibatkan secara langsung warga sekolah (komite sekolah, komite pendidikan, majelis pendidikan) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional;
 - (f) perencanaan dan pengembangan kelembagaan melalui manajemen berbasis sekolah dengan memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - (g) pengembangan manajemen sekolah secara otonom meliputi pengelolaan sekolah secara mandiri dan demokrasi, pengambilan keputusan secara partisipatif, dan akuntabilitas publik secara transparan; dan

1. *Awareness* atau tingkat kesadaran, merupakan tahap awal perkembangan jiwa anak dalam merespon lingkungan secara sadar, yang dialami oleh anak umur 4-12 tahun atau anak tingkat Pra-sekolah, Taman Kanak-kanak, dan Sekolah Dasar (SD). Oleh sebab itu orientasi pelajaran SD bersifat penyadaran/pengenalan terhadap dirinya, lingkungan keluarga, alam sekitar dan bersifat umum; pemahaman terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, dan terhadap masa depannya; pemahaman terhadap dunia dan masa depan bersifat fantastis, serba indah, dan abstrak.
2. *Exploration* atau eksplorasi, dialami oleh anak umur 12-15 tahun atau siswa tingkat SMP/MTs. Orientasi mata pelajaran bersifat umum, pengenalan dan pemahaman terhadap lingkungan sekitarnya yang lebih luas, pengetahuan terhadap fenomena alam dan sosial sangat menyentuh alam pikirannya, anak sangat tertarik dan responsif terhadap interaksi antar fenomena yang ada disekitarnya; pemahaman terhadap dunia dan masa depan masih bersifat tentatif. Pemahaman terhadap fenomena alam bersifat *trial-error* mencoba-gagal untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang ada dalam pikirannya, mereka mencoba dengan berbagai cara dan alternatif.
3. *Development* atau pengembangan, dialami oleh anak umur 16-19 tahun atau siswa SMA/MA/SMK. Orientasi fikiran sudah mulai agak terfokus, pemahaman terhadap fenomena alam dan sosial sebagai pengembangan terhadap apa yang telah didapatkan pada tahap eksplorasi. Siswa perlu dibekali pengetahuan untuk memilih pendidikan dan karir di masa depan. Anak sudah dapat menentukan dan memilih jenjang pendidikan atau karir yang akan dilalui untuk masa depannya.
4. *Advancement* atau pendalaman, dialami oleh orang umur 20 tahun keatas, atau orang dewasa, yang berada pada tingkat Pendidikan Tinggi. Berdasarkan jenis pendidikan atau karir yang sudah ditentukan, mereka akan melakukan pendalaman, berfikir secara rasional, pragmatis, penuh pertimbangan antara kemampuan, keinginan dan kesempatan.
 - b. Jalur akademik
 - c. Jalur kejuruan
 - d. Jalur pendidikan Non-formal

5. Ditinjau dari aspirasi karier, pola berpikir mahasiswa Politeknik berada pada tingkat pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kesiapan untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu. Bidang keahlian yang diperlukan pada dunia kerja sangat bervariasi dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

4. Untuk meningkatkan relevansi, kurikulum Pendidikan Politeknik Kesehatan
 - a. Disusun sendiri oleh para dosen

SOAL PES Disusun oleh praktisi di bidang kesehatan

1. Ditinjau dari jenjang pendidikan, Politeknik termasuk pada
 - d. Menjangkau pendidikan menengah
 - b. Jenjang pendidikan tinggi
5. Dengan berlakunya AFTA dan AFLA diantara negara ASEAN,
 - a. Lulusan Politeknik Indonesia dapat bekerja di Malaysia dengan mudah
 - b. Lulusan Politeknik dapat bekerja di negara sesama anggota AFLA
 - c. Lulusan Politeknik dapat bekerja di negara lain apabila ada hubungan diplomatik
 - d. Lulusan Politeknik dapat bekerja di negara lain apabila memiliki kompetensi dan daya saing
2. Pendidikan Politeknik berada pada jalur pendidikan
 - a. Jalur profesi
6. Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, maka pendirian Pendidikan Politeknik